



Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang

Doksen Eduar Manit¹, William Djani², Ardy Yosafat Pandie³, Cataryn Vlantyna Adam⁴

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: doksenmanit141205@gmail.com¹, William.djani@staf.undana.ac.id²,
Ardy.pandie@staf.undana.ac.id³, catarynadam@staf.undana.ac.id⁴

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

Stunting is a health problem that is a serious concern for every country in the world, including Indonesia. Indonesia, which consists of 38 provinces, has one province with a relatively high stunting prevalence of 16.9% in 2024. Specifically, Manubelon Village, Amfoang Barat Daya District, Kupang Regency, had a stunting prevalence of 12.7% in 2025. The purpose of this study was to analyze the extent of the implementation of policies to accelerate stunting reduction in Manubelon Village, Amfoang Barat Daya District, Kupang Regency, and the inhibiting factors. This study used a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the policy to accelerate stunting reduction in Manubelon Village is quite good but still has weaknesses, such as the lack of collaboration from various stakeholders, timeliness in PMT distribution, supervision from the Manubelon Village Government, the capacity of the integrated health post (posyandu) cadres, the budget from the Manubelon Village Government, facilities and infrastructure in Manubelon Village and the lack of awareness and active participation from the community.

Keywords: Implementation, stunting, Supplementary Feeding (PMT)

ABSTRAK

Stunting merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian serius bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia, yang terdiri dari 38 provinsi, memiliki satu provinsi dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi sebesar 16,9% pada tahun 2024. Secara spesifik, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, memiliki prevalensi stunting sebesar 12,7% pada tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan untuk mempercepat pengurangan stunting di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan untuk mempercepat pengurangan stunting di Desa Manubelon cukup baik namun masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, ketepatan waktu dalam distribusi PMT, pengawasan dari Pemerintah Desa Manubelon, kapasitas kader posyandu, anggaran dari Pemerintah Desa Manubelon, fasilitas dan infrastruktur di Desa Manubelon, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Stunting, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah kesehatan yang menarik perhatian dunia saat ini. Stunting menjadi faktor penyebab utama yang menghambat tumbuh kembangnya anak akibat dari kurangnya gizi dan mengalami sakit secara berulang-ulang saat masih anak-anak (Angraini & Romadona, 2020).

Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika Serikat, stunting adalah kondisi panjang badan (PB) kurang dari minus 2 SD (Standar Deviasi) dan kurang dari minus 3 SD. Atau dengan kata lain, stunting adalah status gizi yang diukur dari panjang badan menurut umur (PB/U atau TB/U) dimana jika anak memiliki PB/U kurang dari minus 2 standar deviasi ($<-2SD$) maka status gizi anak tersebut adalah stunting. Sedangkan jika anak tersebut memiliki PB/U kurang dari minus 3 standar deviasi ($<-3 SD$) maka anak tersebut sudah mengalami stunting kronis (Lora, 2021).

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi. Pada tahun 2024, prevalensi stunting NTT yaitu 16,9%, sedangkan secara khusus dari seluruh kabupaten di NTT, Kabupaten Kupang juga memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi pada tahun 2024 yaitu 14% (BPS NTT, 2025). Angka stunting yang tinggi ini diakibatkan banyak sekali anak yang stunting di desa-desa salah satunya Desa Manubelon.

Desa Manubelon merupakan salah satu desa di Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang yang memiliki prevalensi stunting cukup tinggi mulai dari tahun 2022-2024 yaitu 30,3%; 15,05%; dan 12,7%. Angka stunting yang tinggi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap stunting adalah masalah keturunan, kondisi geografi yang sulit dan kurangnya infrastruktur jalan dan jembatan menyulitkan mobilitas masyarakat dan petugas terhambat, kondisi sanitasi yang masih buruk dimana kurangnya WC sehat di masyarakat dan kurangnya ketersediaan air bersih, dan terakhir kurangnya asupan gizi ibu dan anak akibat kondisi ekonomi kurang mampu.

Pemerintah Desa Manubelon dan Puskesmas Manubelon melakukan berbagai program dan kegiatan untuk menurunkan angka stunting di Desa Manubelon, seperti *door to door* ke tiap-tiap rumah masyarakat, pemberian makanan tambahan (PMT), penimbangan BB dan TB anak setiap bulan, pendampingan balita stunting, bantuan WC sehat dari Pemerintah Kabupaten Kupang, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut, ditemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya koordinasi Pemerintah Desa Manubelon dan Puskesmas Manubelon, masalah prosedur penanganan stunting, kurangnya kapasitas para kader posyandu, kurangnya dukungan dari masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang. Teori implementasi yang digunakan dalam kajian ini adalah teori implementasi menurut Christoph Knill dan Jale Tosun (2020) (dalam Rahardian, 2022) yang

mengemukakan tiga kategori faktor determinan yang sangat penting, yaitu desain kelembagaan, kapasitas administratif dan penerimaan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Metode fenomenologi yaitu mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan struktur dan prosedur serta koordinasi yang baik apabila lembaga tersebut berkolaborasi dengan lembaga lain. Dalam hal ini sangat perlu struktur dan prosedur serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa Manubelon dan Puskesmas Manubelon dalam percepatan penurunan stunting. Berikut penjelasan struktur, prosedur dan koordinasi dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon sebagai berikut:

1. Struktur

Sejauh ini, struktur yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Manubelon dan Puskesmas Manubelon dapat dikatakan cukup baik dimana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selalu beradaptasi dengan keadaan Desa Manubelon. Pembentukan tim pelaksana percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon yang terdiri dari Camat selaku koordinator di tingkat Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kepala Puskesmas Manubelon dan bidang gizi, Kepala Desa Manubelon dan perangkat desa, kader PMT dan kader posyandu Desa Manubelon. Pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan percepatan penurunan stunting dapat berjalan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mudi, 2021) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi di setiap instansi harus baik, dimana pembagian tugas sesuai dengan tupoksi setiap bagian.

Struktur tim percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon menunjukkan tidak adanya fragmentasi sehingga kegagalan komunikasi dapat dihindari, hal ini sesuai dengan pendapat Edwar III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan besar berita atau instruksinya dapat terdistorsi. Meskipun demikian, masih ada kelemahan yang terjadi selama implementasi berbagai program, seperti PMT yaitu kurangnya partisipasi aktif dari Pemerintah Desa Manubelon untuk memobilisasi masyarakat agar datang ke posyandu dan posko PMT. Selanjutnya kurangnya pengawasan dari Pemerintah Desa Manubelon dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seperti PMT.

2. Prosedur

Dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan stunting, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) terdapat prosedur yang harus dijalankan tim pelaksana, yaitu petugas puskesmas Manubelon, para kader posyandu dan orang tua balita stunting serta ibu-ibu hamil. Prosedur penanganan stunting di Desa Manubelon selama ini berjalan cukup baik, namun masih ada kelemahan-kelemahan baik ibu dari pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan, seperti kurangnya ketepatan waktu dalam menyiapkan makanan bagi balita dan ibu hamil, menu makanan yang diberikan petugas puskesmas terkadang tidak sesuai dengan keinginan anak-anak, dan kurangnya kehadiran orang tua dan ibu hamil untuk datang mengambil makanan di posko PMT. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon. Sesuai dengan pendapat Edward III bahwa prosedur yang semakin jelas maka semakin memudahkan para pelaksana kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran dan hasil apa yang dicapai atau di nikmati oleh para pelaksana kebijakan. Selanjutnya (Mudi, 2021) juga menyatakan bahwa salah satu keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari prosedur yang tepat dijalankan pemerintah desa dan pihak puskesmas.

3. Koordinasi

Knill dan Tosun (2020) (Rahardian, 2022) mengemukakan bahwa koordinasi diantara berbagai sektor menjadi elemen penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa koordinasi yang efektif dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan dan tidak tercapainya tujuan dan hasil kebijakan tersebut. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Manubelon, Pemerintah Desa Manubelon dan para kader posyandu dimulai dengan pembentukan tim pelaksana percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon, tujuannya mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon tahun 2025 dengan melaksanakan berbagai program, seperti door to door ke tiap-tiap rumah warga dalam rangka pemeriksaan lingkungan, pemberian makanan tambahan (PMT), penimbangan dan pengukuran BB dan TB balita setiap bulan, pendampingan balita stunting dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting.

Dalam menjalankan kordinasi juga masih ada kelemahan-kelemahan seperti kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa Manubelon untuk melakukan pemantauan dan pengawasan saat kegiatan berjalan. Pemerintah Desa Manubelon juga kurang tegas dalam mengarahkan atau memobilisasi masyarakat untuk datang ke posyandu dan posko PMT. Selanjutnya para kader posyandu juga memiliki kelemahan terkait alat komunikasi (tidak memiliki HP) sehingga kurang atau terlambat mendapatkan informasi sehingga hanya mengharapkan infomasi dari mulut ke mulut diantara para kader posyandu. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Sesuai dengan pendapat (Mudi, 2021) yang menyatakan bahwa kegagalan koordinasi diantara lintas sektor dapat

menyebabkan lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman lintas sektor, sehingga beban penanganan stunting hanya jatuh pada satu sektor kesehatan.

Kapasitas Administratif

Dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting sangat memerlukan kemampuan dari pelaksana kebijakan, anggaran dan sarana prasarana yang memadai. Pemerintah Desa Manubelon dan Puskesmas Manubelon yang merupakan instansi pelaksana perlu untuk memiliki kemampuan tersebut mulai dari sumber daya manusianya, anggaran dan sarana prasarana.

1. Kemampuan pelaksana kebijakan

Kemampuan yang dimiliki pelaksana kebijakan menjadi faktor penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti yang diungkapkan Edward III bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia (staff) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Pemerintah Desa Manubelon dan Puskesmas Manubelon serta para kader posyandu dan kader PMT harus memiliki kemampuan atau kapasitas, dilihat dari jumlah dan pendidikan terakhir. Hasil penelitian peneliti menemukan bahwa tim pelaksana percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon berjumlah 62 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa Manubelon sebanyak 9 orang, Puskesmas Manubelon sebanyak 4 orang dan para kader posyandu sebanyak 50 orang serta kader PMT 1 orang. Dengan jumlah sebanyak ini sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengimplementasikan program-program atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manubelon. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III bahwa sumber daya manusia (staff) yang cukup (jumlahnya) sesuai maka akan memudahkan atau menciptakan keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain jumlah sumber daya manusia (SDM) yang cukup, SDM juga harus cakap. Kecakapan SDM berkaitan dengan keahlian atau kapabilas dan kualifikasi yang sesuai dengan bidan-bidang. Berkaitan dengan para pelaksana kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon masih menjadi tantangan serius. Rata-rata tim pelaksana tersebut masih berpendidikan rendah terutama para kader posyandu yang hanya tamatan SD. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya kemampuan yang dimiliki para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting. Masih banyak pelaksana kebijakan (Pemerintah Desa Manubelon dan kader posyandu) yang tidak memiliki kapabilitas dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga keberhasilan implementasi masih menjadi tantangan serius.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu, (Mudi, 2021) yang menyatakan bahwa masih kurangnya kapabilitas yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, adanya pelatihan yang diadakan di kantor Desa Manubelon pada tanggal 18 Juni 2025 kepada para kader posyandu, perangkat desa, dan juga para tenaga kesehatan terutama dalam pelaksanaan program PMT sehingga memiliki keterampilan yang baik dalam melaksanakan program tersebut di tiap-tiap posyandu. Selain itu,

adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah pemahaman dan wawasan mereka dalam penanganan stunting.

2. Anggaran

Selain kapasitas pelaksana kebijakan, anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti yang dikatakan Edward III bahwa selain SDM, sumber daya lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah dana (anggaran). Terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dimana program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, perlunya anggaran yang cukup sehingga operasional kegiatan tersebut tidak terhambat. Pertama, anggaran dari APBDes Manubelon yang dikelola Pemerintah Desa Manubelon untuk memberikan PMT bagi bumil KEK (ibu hamil dengan kurang energi kronis) dan resiko KEK serta balita bermasalah gizi di Desa Manubelon tahun 2025 sebesar Rp 30.000.000,00 (terbilang: tiga puluh juta rupiah). Anggaran sebanyak ini ternyata tidak cukup karena dalam satu tahun hanya dapat memberikan PMT sebanyak 12 kali, yaitu sebulan sekali. PMT seharusnya diberikan minimal 14 hari untuk balita T, 28 hari untuk balita BB kurang, 56 hari untuk balita gizi kurang dan 120 hari bagi ibu hamil. Oleh karena itu, anggaran Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 12 kali makan dapat dikatakan tidak memadai untuk menurunkan angka stunting di Desa Manubelon.

Kedua, anggaran dari pemerintah pusat yang dikelola Puskesmas Manubelon untuk memberikan PMT bagi balita dan ibu hamil. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk memberikan insentif kepada para kader posyandu yang bertugas menyiapkan makanan bagi balita dan ibu hamil.

Anggaran dari pemerintah pusat dapat dikatakan memadai dalam menurunkan angka stunting, dimana memberikan PMT kepada balita T selama 14 hari, balita BB kurang selama 28 hari, balita gizi kurang selama 56 hari dan ibu hamil selama 120 hari.

3. Sarana dan Prasarana

Selain kapasitas pelaksana kebijakan dan anggaran, sarana dan prasarana juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Seperti yang dikatakan Edward III bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon masih banyak kekurangan mulai dari gedung dan lain-lain. Jumlah posyandu di Desa Manubelon sebanyak 10 posyandu namun hanya memiliki 3 gedung, 9 buah meja, 30 buah kursi, 6 buah bangku, 3 lemari dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kegiatan-kegiatan di posyandu seperti penimbangan BB dan pengukuran TB serta kegiatan lainnya harus dilakukan secara bergantian pada setiap bulan, yaitu mulai tanggal 10-19.

Selain itu, masih ada kekurangan prasarana seperti sumur galian dan sumur bor yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan air bersih, dimana mereka harus jalan jauh sekitar 200-300 meter untuk mengambil air di sumur tetangga. Lebih lanjut, kekurangan lainnya yaitu kekurangan WC sehat di masyarakat dimana masih banyak masyarakat yang menggunakan WC tradisional/tidak sehat sebanyak 142 KK. Oleh karena itu, Pemkab Kupang pada tahun 2024 mengalokasi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Desa Manubelon untuk memberikan bantuan WC sehat kepada 50 KK balita stunting. Anggaran tersebut digunakan membangun 50 unit WC sehat di Desa Manubelon, namun dalam implementasikannya terdapat beberapa unit WC sehat tidak tepat sasaran yaitu kepada KK balita stunting tetapi justru dialihkan kepada KK lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari Pemerintah Desa sehingga program/bantuan tersebut menjadi kurang berhasil atau tidak tepat sasaran.

Penerimaan Sosial

Penerimaan sosial merupakan kesediaan masyarakat sebagai penerima atau sasaran untuk menerima dan mendukung implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi percepatan penurunan stunting perlunya dukungan dari semua pihak baik masyarakat, lembaga adat dan gereja untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Manubelon. Hal ini seperti yang diungkapkan (Nandini et al., 2024) bahwa partisipasi atau dukungan dari tokoh agama dan tokoh adat akan memudahkan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang lebih percaya atau taat kepada penyampaian dari tokoh-tokoh tersebut.

Di Desa Manubelon, Pemerintah Desa dan Puskesmas Manubelon melakukan kerja sama dengan pihak gereja (mayoritas penduduk Desa Manubelon beragama kristen Protestan) dan lembaga adat Desa Manubelon. Dimana ketika masyarakat yang ingin menikah maka pihak gereja akan menyarankan untuk melakukan tes kesehatan terlebih dahulu di PuskesmasManubelon. Hasil tes berupa surat rekomendasi yang akan diberikan/diserahkan kepada pihak gereja.

Selain program tersebut, program PMT juga sangat didukung oleh masyarakat terkhusus orang balita stunting dan ibu hamil dimana selalu hadir untuk mengambil jatah makan anak-anak mereka. Dukungan orang tua balita dan ibu hamil dapat dibuktikan melalui daftar hadir pada saat makan PMT yang rata-rata baik.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang

Dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon, masih ada faktor penghambat yang menghambat percepatan penurunan stunting. Faktor penghambat ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Manubelon dan Puskesmas Manubelon sehingga perlu diatasi agar tidak menjadi batu sanjungan dalam menjalankan program-program penurunan stunting demi masa depan anak-anak di Desa Manubelon. Berikut beberapa faktor

penghambat dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon antara lain:

1. Kurangnya Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan

Kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penghamat dalam upaya menurunkan angka stunting di Desa Manubelon. Hal ini dibuktikan dengan tidak terlibatnya karang taruna, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Selain itu, tidak terlibatnya Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kecamatan Amfoang Barat Daya menunjukkan ketidakseriusan pemerintah setempat untuk mengatasi masalah stunting. Selama ini program pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manubelon masih terhambat oleh karena Puskesmas Manubelon dan Pemerintah Desa Manubelon sendiri yang menjadi tulang punggung untuk mengatasi masalah stunting di Desa manubelon. Kurangnya partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh perempuan, tokoh pemuda, karang taruna dan PKK menjadi salah satu faktor penghambat.

2. Kurangnya Kebersihan Lingkungan Rumah dan WC Sehat

Salah satu faktor penghambat di Desa Manubelon adalah kurangnya kebersihan lingkungan rumah dan WC sehat menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Manubelon agar segera menyelesaikan masalah tersebut. Masih banyak masyarakat Desa Manubelon yang menggunakan WC tradisional sebanyak 142 KK.

3. Kurangnya Akses Air Bersih dan Makanan Bergizi

Akses air bersih di Desa Manubelon masih menjadi tantangan sampai saat ini. Banyak masyarakat yang susah untuk mendapatkan air bersih, dimana mereka harus jalan jauh untuk mengambil air bersih. Jumlah sumur galian yaitu 60 unit dan sumur bor sebanyak 4 unit, jumlah tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih di tiap-tiap rumah tangga di Desa Manubelon. Selain itu, kualitas makanan masyarakat Manubelon masih sangat rendah, dimana rata-rata makanan tiap rumah tangga hanya nasi putih, jagung dan ubi. Kemudian masih kurangnya sayur-sayuran, daging, ikan, telur dan buah-buahan.

4. Rendahnya Pendidikan Orang Tua dan Ekonomi Keluarga

Salah satu faktor penghambat adalah rendahnya pendidikan orang tua terutama ibu. Rata-rata balita stunting berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah, terutama seorang ibu yang sangat berpengaruh terhadap gizi anak. Orang tua balita stunting di Desa Manubelon, rata-rata hanya menempuh pendidikan sampai sekolah menengah pertama (SMP), hal ini mempengaruhi tingkat pengetahuan orang tua (ibu) tentang gizi ibu dan anak. Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga sangat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi. Rata-rata masyarakat Desa Manubelon, terkhusus KK balita stunting bekerja sebagai petani ladang sehingga hanya mengharapkan hasil pertanian di musim hujan. Petani-petani masih bekerja dengan cara trasional sehingga hasil yang didapat juga tidak banyak, hanya cukup memenuhi kebutuhan makanan setengah tahun dan selanjutnya masyarakat biasanya membeli beras di toko.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon dilihat dari Knill dan Tosun (2020), menguraikan 3 faktor penting dalam implementasi kebijakan, yaitu desain kelembagaan, kapasitas administratif dan penerimaan sosial, dapat disimpulkan sebagai berikut. Desain kelembagaan yaitu struktur, prosedur dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Manubelon dan Puskesmas Manubelon masih ada kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Pertama, struktur tim pelaksana percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon yang tidak mencakup semua elemen masyarakat, seperti karang taruna, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan sebagainya. Kedua, prosedur pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, misalnya PMT yang berjalan selama ini kurang efektif, dimana kurangnya ketepatan waktu dalam penyiapan sarapan PMT. Selain itu, menu yang disiapkan juga terkadang tidak disukai oleh balita-balita. Ketiga, koordinasi yang berjalan selama ini kurang efektif, terkhususnya koordinasi antara Pemerintah Desa Manubelon dan Puskesmas Manubelon dalam pengawasan program-program penecgahan dan penurunan stunting, terkhusus program PMT dan WC sehat. Akibatnya, sasaran program menjadi tidak tepat, terutama program WC sehat yang kebanyakan tidak tepat sasaran kepada KK balita stunting. Kapasitas administratif yaitu kemampuan Pemerintah Desa Manubelon, Puskesmas Manubelon dan kader posyandu dalam menjalankan program pencegahan dan penurunan stunting. Pertama, berkaitan dengan jumlah dan kecakapan dari pegawai Puskesmas Manubelon bidang gizi, aparat Pemerintah Desa Manubelon dan para kader posyandu di Desa Manubelon. Jumlah tim pelaksana dapat dikatakan sudah cukup. Namun secara kecakapan, dapat dilihat bahwa masih banyak anggota tim pelaksana, terutama para kader posyandu masih berpendidikan rendah. Kedua, anggaran penanganan masalah stunting, terutama program PMT dapat dikatakan sudah cukup memadai. Anggaran PMT dari pemerintah pusat yang dikelola pihak Puskesmas Manubelon dapat memenuhi semua kebutuhan dalam program PMT untuk memperbaiki gizi balita dan ibu hamil. Sedangkan anggaran PMT dari APBDes dapat dikatakan masih kurang, dimana PMT dilakukan 12 kali dalam 1 tahun. Hal tersebut masih belum cukup memenuhi gizi balita dan ibu hamil. Ketiga, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manubelon masih banyak kekurangan, seperti alat timbang, WC sehat, dan lain sebagainya. Penerimaan sosial yaitu kesediaan masyarakat Desa Manubelon untuk menerima dan mendukung implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Manubelon. Dukungan masyarakat Manubelon dikatakan cukup baik namun oleh karena kesibukan pribadi sehingga terkadang tidak bisa hadir saat kegiatan di posyandu. Selain itu, dukungan dari tokoh agama yaitu pihak gereja dan tokoh adat di Desa Manubelon sudah cukup baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan

penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, Y., & Romadona, N. F. (2020). Review of Stunting in Indonesia. *Journal Atlantis Press SARL.*, 454(Ecep 2019), 281–284.
- Djani, W. (2022). *Kebijakan Publik (Dan Implikasinya Di era Otonomi Daerah)* (Cetakan 1). Penerbit: Zifatama Jawara.
- Duadji, N. T. & N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi* (Cetakan 1). Penerbit Suluh Media.
- Lontaan, A. (2023). *Stunting* (Cetakan 1). Penerbit Pustaka Aksara.
- Lora, R. (2021). *Stunting Dalam Kajian Molekuler* (Cetakan 1). Penerbit: UPT.Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Mudi, S. D. & T. & D. E. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021. *Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNDIP*.
- Nandini, N., Kusariana, N., Astorina, N., Dewanti, Y., & Murni, M. (2024). Stakeholder Collaboration to Stunting Prevention in the Village Accelerate. *BIO Web of Conferences* 133, 00036(72).<https://doi.org/https://doi.org/10.1051/bioconf/2024133>
- Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan ke). Penerbit Cv.Alfabeta, Bandung.
- Rahardian, R. (2022). *Studi Kebijakan Publik: Teori, proses dan Isu Kontemporer* (Cetakan 1). Penerbit Cv Budi Utama.